

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) adalah salah satu perusahaan tambang yang terletak di sebelah barat daya pulau Sumbawa, di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB, Indonesia. Luas Area kontrak awal PTNNT yaitu 1.127.134 Ha dan baru beroperasi seluas 87.540 Ha. PTNNT merupakan perusahaan patungan Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo), PT Pukuafu Indah (Indonesia) dan PT Multi Daerah Bersaing. Newmont dan Sumitomo bertindak sebagai operator PTNNT.

PT Newmont menandatangani Kontrak Karya pada tanggal 2 Desember 1986 dengan Pemerintah RI untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan menjadi dasar dimulainya pembangunan Proyek Tambang Batu Hijau dengan total investasi US\$ 1,8 Miliar. Proyek pembangunan tambang, pabrik dan prasarananya selesai pada 1999 dan mulai beroperasi secara penuh pada 1 Maret 2000. (Tenggara, 2012)

Hasil produksi tambang PTNNT berupa tembaga dan emas mengalami penurunan yang pesat pada tahun 2014. Sebelum ada aturan pelarangan ekspor tambang mentah, Newmont rutin mengekspor hasil tambangnya ke beberapa negara tujuan utama seperti Jepang dan Korea. Mengenai produksi konsentrat, pihak Newmont memperkirakan produksi mencapai 200.000-300.000 ton (Detikfinance, 2014). Sejalan dengan brlakunya

UU no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yaitu berupa larangan ekspor konsentrat serta bea ekspor yang cukup tinggi dan kewajiban bagi setiap perusahaan tambang untuk membangun Smelter, namun PT Newmont menolak kewajiban untuk melakukan pembangunan smelter karena alasan pada UU Minerba no. 4 tahun 2009 telah dinyatakan bahwa pembangun smelter adalah hal yang tidak wajib. Tetapi ada kewajiban lain yaitu dengan melakukan pemurnian konsentrat.

Perusahaan tambang bisa saja melakukan pemurnian pada Smelter yang sudah ada di Indonesia. Seperti misal di PT Smelting Gresik, sayangnya kemampuan PT Smelting Gresik tidak bisa mengakomodir semua produksi tembaga PTNNT. Karena harus berbagi pakai dengan PT Freeport. PTNNT hanya bisa memasok 25% hasil tambang ke PT Smelting Gresik. Atau pilihan lain perusahaan tambang bisa membentuk konsorsium untuk membangun Smelter. Namun itupun tidak bisa direalisasikan cepat, belum lagi mungkin kepastian pasokan bahan tambang dan juga sumber modal untuk investasinya.

Newmont sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan Freeport untuk memasok konsentrat di smelter Gresik. Masalahnya nota kesepahaman antara Newmont dan Freeport ini akan habis pada akhir bulan ini. Di sisi lain, izin ekspor Newmont akan habis 19 Maret 2015. Izin ekspor konsentrat Newmont ini diberikan sejak 18 September 2014, dengan kuota ekspor tembaga mencapai sekitar 350 ribu ton. Makanya pemerintah kembali menagih keseriusan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut untuk bisa membangun smelter dan mengolah konsentratnya agar bisa ekspor. Namun hingga saat pemerintah Indonesia menanyakan keseriusan pada pihak Newmoon terkait Nota kesepahaman dengan PT. Freeport mengenai Joint smelter di Gersik, PT Newmont belum

memberikan jawaban yang serius kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia yang mempertanyakan keseriusan pihak Newmont akhirnya tidak memberikan izin ekspor kepada PT. Newmoon.

PT. Newmont memiliki beberapa alasan yang mendukung mengenai ketidaksanggupan PT. Newmont membangun Smelter seperti pemerintah Indonesia minta. Menurut pihak Newmont pembangunan smelter bukanlah perkara ringan ada beberapa kesulitan yang menghambat dan menjadi pertimbangan PT Newmont dalam membangun smelter yang pertama adalah anggaran. Dengan nilai investasi untuk bangun Smelter berkisar US \$1.5-2.5 Milyar (Rp. 18 – 30 triliun), Newmont tidak akan sanggup mendapatkan uang tersebut semudah membalik telapak tangan. Pinjaman US\$ 600 juta (7 Triliun) dari BNP Paribas dan juga dari salah satu bank nasional 2 tahun lalu juga belum selesai dicicil, saat ini Newmont butuh anggaran Rp. 18 triliun untuk pembangunan Smelter. Yang kedua adalah kesiapan infrastruktur daerah Sumbawa sendiri, jika Smelter tersebut mau dibangun di tanah Sumbawa. Masalahnya adalah untuk mengoperasikan Smelter dibutuhkan sumber listrik dengan kapasitas besar. Bahkan sebagian besar investasi pembangunan Smelter digunakan untuk membangun Power plant ini 70 – 140 megawat pasokan listrik untuk Smelter bukan perkara mudah. Bahkan power plant Newmont yang berada di Benete saat ini pun yang berkapasitas sekitar 28 MW tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pasokan listrik untuk mengoperasikan Smelter.

Alasan yang ketiga adalah cadangan mineral yang akan diolah oleh Smelter tersebut. Mengingat biaya investasinya sangat tinggi, dalam membangun Smelter harus dihitung kapan Break Even Point-nya. Hal ini terkait berapa besar mineral yang akan diolah oleh Smelter tersebut nanti-nya. Masalahnya pemerintah tidak memiliki road map jelas

mengenai cadangan mineral yang ada di bumi Indonesia. Sehingga pengusaha Smelter pun tidak memiliki data akurat kapan Break Event Point mereka jika membangun Smelter. (AW, 2014)

Meski telah melakukan berbagai upaya terbaik untuk menyelesaikan isu ekspor melalui komitmen atas dasar niat baik untuk mendukung kebijakan Pemerintah, PTNNT belum dapat meyakinkan Pemerintah bahwa KK (Kontrak Karya) berfungsi sebagai rujukan dalam menyelesaikan perbedaan. Dan PT Newmont tetap menuntut diberikannya izin ekspor konsentrat karena berlandaskan perjanjian kontrak karya (KK) mengenai hak mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya untuk mengembangkan dan menambang setiap endapan. Mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpan dan mengangkut semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual, serta melakukan semua operasi dan kegiatan lainnya yang diperlukan yang baru berakhir pada 2030, namun pemerintah Indonesia tetap bersikukuh untuk tidak memberikan Surat Ijin Ekspor kepada Newmont dengan alasan bahwa amanah pada UU no.4 tahun 2009 harus tetap dijalankan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana upaya PT Newmont Nusa Tenggara mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendapatkan surat izin ekspor (SEP) konsentrat?”

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka dasar teori sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, karena kerangka dasar teori inilah yang nantinya akan penulis gunakan sebagai dasar penulisan penelitian ini. Teori merupakan sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep - konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual.

Untuk menjawab dan menjelaskan langkah-langkah ataupun upaya PT Newmont dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendapatkan surat izin ekspor, maka penulis menggunakan teori dan konsep yang sesuai dengan pembahasan di atas, adapun teori yang digunakan yaitu Teori sistem politik (David Easton) antara lain :

1. Teori Sistem Politik (David Eatson)

David Easton adalah seorang ilmuwan politik dari Harvard University yang memperkenalkan pendekatan analisa sistem sebagai metode dalam memahami politik. Menurut David Easton sistem politik adalah sebuah sistem yang terdiri dari nilai – nilai yang ada bersifat paksaan serta mengikat masyarakat secara keseluruhan. Davin Easton menambahkan bahwa sistem politik dapat dikenali sebagai sebuah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkatan sosial, melalui makna nilai – nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat (Basri, 2009).

Teori Easton ini bersifat abstrak, karena Easton ingin menghantarkan politik menjadi ilmu pengetahuan seperti generalisasi, abstrak, validitas, dan sebagainya untuk mengukur tingkah laku politik seseorang. Dalam mengubah politik menjadi ilmu pengetahuan, Easton menciptakan model abstrak, mempolakan rutinitas dan proses

politik secara umum. Dengan cara tersebut menurut Easton memiliki tingkat abstraksi saintifikasi yang sangat tinggi, sehingga generalisasi politik sebagai ilmu akan tercapai. Menurut Easton politik harus dilihat secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan kumpulan dari beberapa masalah yang harus dipecahkan. Dalam sistem politik dikenal istilah *Revolusi Behavior* yang merupakan fokus utama dalam pendekatan sistem politik, yang mana pendekatan ini bertujuan untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya berfokus pada Negara dan kekuasaan. Sistem politik sendiri memiliki kemajuan yang sangat pesat dengan pendekatan klasik ilmu politik. Hal ini didasari karena semakin luas kajian –kajian yang dipelajari dalam sistem politik, yang mana pendekatan – pendekatan klasik ilmu politik hanya mempelajari lembaga formal pada Negara tersebut. Hal tersebut merupakan suatu kelemahan bagi sistem politik klasik. Karena politik tidak hanya dipengaruhi aspek –aspek formal pada Negara saja tetapi ada aspek nonformal yang mempengaruhi sebuah kebijakan dan keputusan (Darry, 2013).

Secara sederhana Easton mengungkapkan bahwa memahami sistem politik sama seperti halnya memahami sistem ekonomi, yang keseluruhannya merupakan subsistem dari sistem yang besar. Namun, sistem politik menurut pandangan Easton bersifat khusus, karena memiliki kekuatan membuat keputusan yang mengikat semua anggota dalam sistem. Perbedaan satu sistem politik dengan sistem politik lainnya dapat dipisahkan melalui tiga dimensi yaitu: *polity*, *politic*, dan *policy* (kebijakan). Pendapat Easton bahwa definisi politik dari ketiga dimensi ini terbukti lebih efektif, untuk memahami realitas politik dalam upaya memberikan pendidikan politik.

Pendekatan sistem berawal pada adanya tuntutan, harapan, dan dukungan sebagai syarat sebelum memasuki proses konversi dalam sistem politik. Setelah melalui

proses konversi barulah keluar keputusan mengikat seluruh anggota masyarakat dalam bentuk hukum ataupun perundangan. Hukum dan perundangan tersebut akan menciptakan opini dalam masyarakat, menghasilkan masukan baru, dan kembali menciptakan tuntutan dan atau dukungan baru.

Easton memandang sistem politik sebagai tahapan pembuatan keputusan yang memiliki batasan. Model sistem politik terdiri dari fungsi input, berupa tuntutan dan dukungan; fungsi pengolahan (*conversion*); dan fungsi output sebagai hasil dari proses sistem politik, lebih jelasnya seperti berikut ini:

Tahap 1: Di dalam sistem politik akan terdapat “tuntutan” untuk “output” tertentu (misal kebijakan), dan adanya orang atau kelompok mendukung tuntutan tersebut.

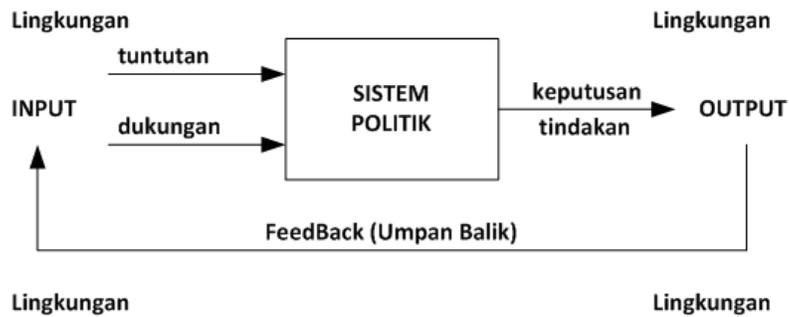
Tahap 2: Tuntutan-tuntutan dan kelompok akan berkompetisi “diproses dalam sistem”, memberikan jalan untuk pengambilan keputusan itu sendiri.

Tahap 3: Setiap keputusan yang dibuat (misal: kebijakan tertentu), akan berinteraksi dengan lingkungannya.

Tahap 4 : Ketika kebijakan baru berinteraksi dengan lingkungannya, akan menghasilkan tuntutan baru dan kelompok dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut (“feedback”).

Tahap 5 : Kembali ke tahap 1.

Gambar 1. Skema kerja sistem politik Easton



Sumber: Haryanto (1982). *Sistem politik : suatu pengantar*. Yogyakarta: liberty, hal: 9

Apabila suatu sistem dijalankan dengan menggunakan skema kerja sistem politik Easton dan hasilnya akan mendapatkan “sistem politik yang stabil.” Sedangkan apabila sistem tidak berjalan sesuai tahapan, maka akan mendapatkan “sistem politik disfungsi.” Easton menetapkan batasan lingkungan pada sistem politik dimana input dan output senantiasa berada dalam keadaan tetap. Keuntungan metode ini terdapat pada keistimewaannya menggabungkan berbagai aspek dan elemen politik ke dalam teori analisa sistem. Proses penggabungan akan membuka peluang untuk melembagakan politik yang rumit dan kemudian mensistemasikannya dalam sistem, tanpa melupakan politik yang sifatnya multidimensi.

Dalam konteks permasalahan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan PT Newmont, di mana PT Newmont bertindak sebagai input yang memberikan sebuah tuntutan. Adapun tuntutan tersebut didukung oleh beberapa pihak. Seperti adanya dukungan dari badan hukum Internasional yang berbadan hukum Belanda.

Dalam karyanya Easton menyebut ada berbagai fungsi input, diantaranya Artikulasi Kepentingan. Artikulasi kepentingan yaitu suatu proses penyampaian kepentingan – kepentingan rakyat kepada pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah

dan legislative maupun yudikatif. Pada kasus Newmont dan Pemerintah Indonesia, penulis melihat ada beberapa *style* yang digunakan oleh Newmont dalam upaya menyampaikan kepentingannya. Pertama, *Style Manifest*. *Style* ini yaitu penyampaian kepentingan yang dilakukan/dirumuskan secara eksplisit dan tegas disampaikan pada sistem politik. Kedua, *Style Spesifict*. *Style* ini menunjukkan secara nyata tuntutan atau kepentingan yang diinginkan sehingga mudah ditanggapi oleh sistem politik.

Fungsi input yang lain salah satunya adalah Agregasi Kepentingan. Agregasi Kepentingan suatu langkah/upaya untuk mengkonversikan tuntutan-tuntutan menjadi sebuah kebijakan umum. Pada kasus pemerintah Indonesia dan Newmont, terdapat salah satu *style* yang digunakan adalah *Pragmatic Bergaining*. *Style* ini merupakan proses tawar-menawar di mana berbagai tuntutan yang ada dikombinasikan dan sampai pada tahap munculnya berbagai alternative kebijakan (solusi yang menengahi tuntutan kedua belah pihak). Seperti pada saat Pemerintah Indonesia memeberlakukan kebijakan yang berupa pelarangan ekspor konsentrat, dan menaikkan bea ekspor dengan cukup tinggi, kebijakan tersebut di tolak oleh Newmont karena berbagai alasan. Dalam menemukan jalan keluar Newmont memberikan tuntutan kepada pemerintah berupa gugatan arbitrase. Pemerintah menganggap gugtan tersebut tidak seharusnya di layangkan karena mengingat kedua belah pihak belum selesai melakukan perundingan. Sehingga pemerintah memberikan syarat kepada Newmont untuk mencabut gugatannya dan wajib melakukan pembangunan *smelter*.

2. Konsep kelompok kepentingan

Dalam kehidupan masyarakat, baik itu individu atau kelompok tidak bisa di lepaskan dari kepentingan. Kepentingan itu bisa dicapai dengan berbagai cara yang

berbeda sesuai dengan kesepakatan yang akan ditempuh oleh kelompok itu. Adapun salah satu cara yang di tempuh dalam mengartikulasikan kepentingan kelompoknya yaitu dengan membangun kelompok kepentingan atau yang bisa disebut dengan *interest group*. Yang dimaksud dengan kelompok kepentingan adalah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan yang sama, dan mereka melakukan kerjasama untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah demi mencapai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginannya tadi.

Menurut Gabriel A. Almond, yang menekankan pada aspek struktur dan fungsi komponen-komponen dalam sistem politik. Kelompok kepentingan merupakan salah satu dari struktur politik yang terdapat dalam sistem politik, sebagai bagian dari infrastruktur politik. Fungsi utama kelompok kepentingan yaitu melakukan artikulasi politik.

Artikulasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yang didalamnya terdapat kegiatan penggabungan berbagai kepentingan dan tuntutan dalam masyarakat yang akan diubah menjadi alternatif-alternatif kebijakan. Fungsi ini dijalankan oleh kelompok kepentingan, yang nantinya akan disampaikan kepada partai politik agar diperjuangkan sampai ketingkat suprastruktur politik dan menjadi kebijakan yang akan diimplemetasikan. Fungsi ini dilakukan secara terus-menerus selama pemerintahan ada dan melakukan berbagai aktifitas, yang sinkron dengan adanya berbagai kepentingan yang beragam dalam masyarakat.

Dalam hal ini ada beberapa saluran artikulasi kelompok kepentingan yang mana saluran ini bertujuan untuk menyatakan pendapat dalam menentukan luasnya dan

efektifnya tuntutan kelompok kepentingan. Saluran-saluran paling penting adalah sebagai berikut:

a. Demonstrasi dan tindakan kekerasan.

Demonstrasi dan tindakan kekerasan ini merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tuntutan/kepentingan. Sarana ini banyak dipergunakan oleh kelompok anomik.

b. Hubungan Pribadi

Adalah salah satu sarana penyampaian kepentingan melalui media keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara kepada elit politik.

c. Perwakilan Langsung

Sarana artikulasi dan agregasi kepentingan yang bersifat resmi, seperti, legislative, eksekutif dan yudikatif serta lembaga resmi lainnya.

d. Saluran Formal dan Institusional lain

Sarana artikulasi yang meliputi antara lain media massa cetak, elektronik, televisi (formal) dan partai politik (Institusional) lainnya.

Adapun Jenis-jenis kelompok kepentingan ini menurut Gabriel a. Almond meliputi:

a. Kelompok anomic

Adalah kelompok yang terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan arena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, maka kelompok ini sering tumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional, seperti, demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dll.

b. Kelompok Non Assosiasional

Adalah kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat temporer (kadang-kala). Wujud kelompok ini antara lain adalah kelompok keluarga, keturunan, etnik, regional yang menyatakan kepentingan secara kadang-kala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga dan atau pemimpin agama.

c. Kelompok Institusional

Adalah kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulasi kepentingan.

Contohnya, Partai politik, korporasi bisnis, Badan Legislatif, Militer, Birokrasi, dan lain-lain.

d. Kelompok Assosiasional

Adalah kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal.

Contoh lembaga ini adalah Serikat Buruh, KADIN, Paguyuban, MUI, NU, Muhammadiyah, KWI dan lain-lain.

Dalam permasalahan PT Newmont dan pemerintah Indonesia ini menyatakan bahwa PT Newmont berperan sebagai kelompok institusional. Kelompok institusional adalah kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulasi kepentingan. Kelompok ini mempunyai strategi sendiri dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, dengan menggunakan saluran artikulasi kelompok Perwakilan

Langsung yaitu sarana artikulasi dan agregasi kepentingan yang bersifat resmi, seperti, legislative, eksekutif dan yudikatif serta lembaga resmi lainnya.

Sehingga dalam mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah Indonesia PT Newmont menggunakan teknik penyampaian pengaruh yang dilakukan oleh kelompok kepentingan adalah *lobbying* (melobi). Melobi merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik lobi, dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan. Karena dari itu PT Newmont yang merupakan kelompok institusiunal melakukan lobi langsung terhadap pemerintah Indonesia dalam mempengaruhi perubahan kebijakan.

Selain teknik *lobbying*, PT Newmont dengan agregasi kepentingan yang bersifat resmi melakukan gugatan arbitrase terhadap pemerintah Indonesia. gugatan tersebut di layangkan kepada pemerintah Indonesia untuk mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah Indonesia.

D. Hipotesa

Berdasarkan teori dan pokok permasalahan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara yang mana PT Newmont Nusa Tenggara memiliki upaya dalam mempengaruhi kebijakan Pemerintah Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh PT Newmont adalah :

1. PT Newmont melakukan gugatan arbitrase kepada pemerintah Indonesia.
2. PT Newmont melakukan lobi langsung kepada Pemerintah Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Seperti yang digunakan oleh DR.Lexy J. Moleong, MA., dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Selain itu, semua data yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Meskipun demikian, penelitian secara kuantitatif sering juga menggunakan data statistic yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Akan tetapi, tidak terlalu banyak mendasarkan diri atas data statistik, tetapi memanfaatkan data statistik itu hanya sebagai cara untuk mengantar dan mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan dan dicari sendiri sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui buku, jurnal, dan artikel. Selain itu penulis juga menggunakan data-data yang diperoleh dari berbagai penelusuran situs internet.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan batasan jangkauan dalam penelitian. Ini sebagai pengingat bagi penulis dalam melakukan penelitian tetap disiplin dan juga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Untuk membatasi agar pembahasan tidak terlampaui meluas dan dapat lebih fokus terhadap perizinan ekspor oleh pemerintah Indonesia, dimana surat izin ekspor merupakan salah satu hal terpenting dalam PT Newmont dalam memperlancar pemurnian bahan mentah/ konsentrat. Dan membuat penulis ingin mencari tahu dan tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi upaya apa yang

dilakukan PT Newmont Nusa Tenggara dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia, maka penulis mengambil judul **“Upaya PT Newmont Nusa Tenggara dalam mempengaruhi kebijakan Indonesia”**

G. Sistematika Penulisan

Bab 1 Terdiri dari pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang yang merupakan sumber masalah dari penelitian ini. Kemudian rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan Membahas tentang hasil produksi PT Newmont Nusa Tenggara, sejarah awal PT Newmont.

Bab III membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dan rencana pembangunan smelter.

Bab IV Membahas tentang upaya apa yang dilakukan PT Newmont dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia

Bab V Merupakan bab terakhir dan penutup skripsi ini yang memuat kesimpulan dari bab – bab sebelumnya